**KERANGKA ACUAN KERJA**

**Pengawasan ke Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan Daerah Dalam Angka 2022**

Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PUSAT STATISTIK

Satuan Kerja : BPS PROVINSI JAMBI

Pembebanan : DIPA NOMOR: SP-DIPA 054.01.2.428145/2022

Program : 2897 (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi

Informasi Statistik

Kegiatan : 2897.BMA.004 (Laporan Diseminasi dan Metadata

Statistik (SSN)

Penanggung jawab : Fungsi IPDS



***BADAN PUSAT STATISTIK***

***PROVINSI JAMBI***

1. **Dasar Hukum**

* Undang-undang no. 16 Tahun 1997 tentang Statitik.
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854).
* Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
* Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
* Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
* Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

1. **Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas: akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dan terkini yang bersumber dari berbagai instansi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan di Kabupaten/Kota diperlukan untuk menjaga kualitas data.

1. **Maksud dan Tujuan**
2. **Maksud**

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan daerah dalam angka di kabupaten/kota.

1. **Tujuan**

Mengetahui progres pelaksanaan penyusunan daerah dalam angka di kabupaten/kota dan prosesnya.

1. **Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan daerah dalam angka di kabupaten/kota terlaksana dengan baik dan sesuai target.
2. **Metode Pengadaan Barang/jasa dan Ruang Lingkup**

-

1. **Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Tempat : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi

Waktu Pelaksanaan : 1 - 30 September 2022

1. **Biaya**

Pembiayaan akan dibebankan dalam DIPA Satuan kerja BPS Provinsi Jambi Nomor : SP-DIPA 054.01.2.428145/2022

1. Perjalanan pengawasan ke kabupaten/kota dalam rangka penyusunan daerah dalam angka sebanyak 5 O-P senilai Rp. 9.350.000,-.
2. **Susunan Peserta**

* Wulan Agus Pramita Sari, S.S.T.
* Uziroh, S.Stat.

1. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

Program : 2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi

Informasi Statistik

Kegiatan : 2897.BMA Data dan Informasi Publik

Klasifikasi Rincian Output (KRO) : 2897.BMA.004 Laporan Diseminasi dan Metadata

Statistik

Rincian Output (RO) : 052 Pengumpulan Data

Komponen : 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Sub Komponen : Perjalanan pengawasan ke kabupaten/kota dalam rangka penyusunan daerah dalam angka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akun** | **Rincian** | **Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 2897 | Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik | | | | |
| 2897.BMA. | Data dan Informasi Publik | | | | |
| 2897.BMA.004 | Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik | | | | |
| 052 | Pengumpulan Data | | | | |
| 524111 | Perjalanan pengawasan ke kabupaten/kota dalam rangka penyusunan daerah dalam angka | 5 | O-P | 1.870.000 | 9.350.000 |

1. **Spesifikasi Teknis yang Diperlukan untuk pengadaan**

-

|  |  |
| --- | --- |
| Menyetujui,  a.n Kepala BPS Provinsi Jambi  Kepala Bagian Umum  Syarpan Dani, SE.  NIP. 19660116 199203 1 001 | Jambi, 2 September 2022  Penanggung jawab,  Koordinator Fungsi IPDS  Iman Karyadi, S.S.T.  NIP. 19691008 199112 1 001 |